

CATATAN RESPONS**PROFESI
DEMI KEPENTINGAN PUBLIK**

Profesionalisme merupakan kata yang sering terdengar dalam masyarakat modern. Munculnya kata tersebut dalam wacana publik seiring dengan tuntutan masyarakat modern yang mengedepankan kualitas dan kuantitas dalam kinerja.

Gagasan ini memiliki latar belakang kapitalisme. Sebagaimana digambarkan oleh Bertand Russel dalam *The Prospects of Industrial Civilization* (1996) kapitalisme telah meletakkan ukuran kesuksesan pada peningkatan jumlah produksi yang memberikan keuntungan berlipatganda bagi pemilik modal. Dalam bingkai pengertian seperti ini, pengertian profesionalitas diidentikkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk secara terus menerus. Modal untuk meningkatkan produk disandarkan pada pengetahuan yang memadai dan penguasaan teknologi secara intensif. Atas dasar inilah meningkatkan *hard skills* dan kompetensi berkelanjutan diakui sebagai bagian peningkatan profesionalisme seseorang.

Paham kapitalisme seperti diuraikan di depan ternyata memiliki eksekusi yang luar biasa terhadap kriteria profesionalitas seseorang. Orang yang profesional tidak lagi dilihat dari kemampuannya untuk mengabdikan dirinya bagi orang lain, tetapi pada perolehan sesuatu dari orang lain. Orang yang profesional diidentikkan dengan orang yang sukses mendapatkan sesuatu. Modus hidupnya lebih pada "having" daripada "being" meminjam terminologi Erik Fromm. Artinya, orang yang profesional adalah dia yang mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi orang yang menjadi tempat gantungan kerjanya.

Jadi, nilai substansial profesi bagi manusia modern tidak lagi dalam ranah kepentingan sosial, melainkan ranah kepentingan ekonomis, yakni kekayaan yang melimpah. Karena itulah semakin orang mampu menghasilkan kekayaan semakin profesional ia dinilai.

Kapitalisme Pendidikan

Orientasi kapitalisme telah pula menghantui dunia pendidikan, khususnya dunia perguruan tinggi. Roh kapitalisme ini terungkap dalam dua hal, yakni jiwa di dalam lembaga sendiri dan orientasi pembentukan para peserta didik. Jiwa lembaga pendidikan lebih menonjolkan dimensi ekonomis, yakni kalkulasi profit dalam seluruh dinamika aktivitasnya dan memomorduakan fungsi sosialnya. Sementara orientasi pembentukan peserta didik didominasi kebijakan yang menekankan secara besar-besaran pengembangan kemampuan praksis. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pasar. Karena itulah kata kunci yang sekarang didengungkan adalah "kompetensi" dan "siap pakai". Yang menyedihkan kompetensi itu hanya dikaitkan dengan kemampuan teknis dalam arti cara-cara untuk memperkaya diri melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Orientasi pendidikan dengan demikian adalah memperkaya diri daripada mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan bertahun-tahun hanya menjadi instrumen individual. Episteme pengabdian masyarakatnya tereliminasi. Hal ini tentunya dapat dimengerti karena mereka selama proses pendidikan lebih diorientasikan ke arah itu.

Dan ini merupakan dampak dari internalisasi dari roh kapitalisme itu sendiri. Profesi lebih dikaitkan dengan upaya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi sebanyak mungkin.

Dalam aras ini tidaklah sulit dimengerti mengapa masih banyak intelektual yang terlibat dalam bidang ekonomi masih menganggap prinsip-prinsip etis dalam bisnis sebagai sesuatu yang aneh, dan harus ditolak. Mereka yakin bahwa "business as usual" atau "Business is business, morality is morality". Sekali lagi, dominasi konsep seperti ini tentunya merupakan imbas dari internalisasi roh kapitalisme dalam dunia pendidikan itu.

Kemerosotan substansi dan nilai profesi seperti di atas ternyata tidak hanya menghantui para sarjana ekonomi, melainkan juga telah merambat ke dunia kesehatan. Apa bila para pelaku medis jujur untuk menjawab pertanyaan ini: apakah keselamatan nyawa manusia masih berada pada posisi pertama, maka jawabannya tentunya bernada negatif. Fakta sosial di lapangan telah membuktikan bahwa sejumlah pelaku medis seperti dokter dan institusi sosial yang bergerak dalam bidang medis seperti rumah sakit, tidak lagi berjalan pada rel moral yang sebenarnya, yakni menempatkan kepentingan masyarakat publik (baca: keselamatan manusia) sebagai imperatif kategorisnya, meminjam Immanuel Kant. Mereka justru cenderung memosisikan kepentingan ekonomis sebagai *prima facie*-nya, yakni uang. Sumpah profesi yang diucapkan pelaku medis hanya sebatas bibir, dan tidak menjadi dasar dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan. Demikian halnya visi dan misi karitatif institusi kesehatan hanya sebatas tulisan indah di atas kertas, namun hampa dari kenyataan. Inkonsistensi seperti ini sesungguhnya merupakan

pengingkaran terhadap hakikat profesi itu sendiri.

Kembali ke Hakikat Profesi

Hakikat profesi menurut Daryl Koehn dalam *The Ground of Professional Ethics* (1994:), bukan terletak pada peningkatan kepuasan bagi diri sendiri dalam bentuk keuntungan ekonomi, melainkan terletak dalam perhatian terhadap kepentingan publik. Artinya, orientasi kinerja seorang profesional bukan pertama-tama ke dalam, melainkan keluar. Karena itulah dalam menjalankan pekerjaannya, Daryl Koehn sepakat dengan prinsip utilitarisme yang berbunyi "the greatest happiness for the greatest number" sebagai basis moral dalam menjalankan profesi.

Apa argumen mendasar menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan dari profesi? Jawaban paling jelas ada pada kata tanggungjawab dan panggilan. Profesi tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab justru merupakan akar munculnya profesi. Secara negatif dapat dikatakan, profesi tidak akan ada tanpa dilandasi dengan rasa tanggungjawab. Dengan demikian , tanggungjawab adalah *atman* atau roh dari profesi. Tanggungjawab dimaksudkan adalah tanggungjawab terhadap yang lain. Inilah sebenarnya diemban oleh profesi seperti rohaniwan, pengacara, dan dokter sejak dulu. Artinya, motif dasar dari tiga pekerjaan ini yang pada awalnya diakui sebagai profesi justru luhur, yakni kepedulian kepada orang lain. Rohaniwan peduli pada keselamatan jiwa para umat, para pengacara peduli kepada keadilan, dan para dokter peduli kepada keselamatan fisik manusia.

Mengingat profesi terarah pada kepentingan publik, maka konsep tanggungjawab memuat pengertian bahwa dalam menjalankan pekerjaan pelaku profesional melakukan sesuatu dengan hasil

yang maksimal bagi orang lain sebesar-besarnya serta keberanian untuk menanggung risiko perbuatan yang dilakukannya. Jadi, tanggungjawab dalam profesi memiliki dua arah, yakni arah internal dalam pengertian menggunakan potensi diri semaksimal mungkin untuk melayani orang lain, dan eksternal dalam pengertian mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang lain.

Selain itu, sikap lain yang perlu dibangun dalam mewujudkan profesi dalam kepentingan publik adalah menempatkan pekerjaan sebagai sebuah panggilan. Tidak semua orang untuk bisa dan mampu menjadi dokter. Orang-orang yang bisa masuk ke kedokteran dan bisa sampai mengemban profesi dokter adalah orang-orang yang istimewa. Dengan menggunakan bahasa religius, mereka itu adalah orang-orang yang terpancung. Bingkai religius seperti ini mengisyaratkan bahwa apa yang dikerjakan merupakan sesuatu yang luhur dan mulia.

Seperti apa karakter orang yang terpancung? *Pertama*, dia menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang dilayani. *Kedua*, dia rela berkorban. Seorang pelayan tidak dikuasai oleh kalkulasi untung rugi secara ekonomis. Orang yang rela berkorban mencurahkan dirinya untuk kepentingan yang lain. *Ketiga*, orang terpancung terikat pada komitmen moral. Apa yang diucapkannya di depan publik akan dipegangnya. Dan sumpah itu menjadi pegangan dalam menjalankan profesinya.

Revitalisasi Pedagogi etis

Di kalangan kaum profesional, makna etis seperti di atas semakin lama semakin memudar dari praksis. Kalau kecenderungan semakin menghampakan nilai-nilai dalam profesi terus dibiarkan,

maka dampaknya negatifnya akan sangat besar, yakni akan terjadi penggerusan nilai-nilai humanisme.

Pertanyaan tentunya, upaya apa yang diperlukan untuk mengembalikan episteme profesi sebagaimana digagaskan oleh Daryl Koehn di atas? Jawabnya: revitalisasi etika profesi dalam proses pendidikan. Artinya, kita harus menempatkan etika sebagai bagian dari aktivitas proses belajar mengajar. Minimal selama masa pendidikan para calon pelaku medis mendapatkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang memadai tentang persoalan-persoalan etis yang mengiringi profesi mereka dan prinsip-prinsip etis yang menjadi pijakan profesinya.

Apakah itu berarti kurikulum baru, misalnya etika profesi perlu ditambah? Tentunya pendidikan etika profesi tidak bisa menjadi jaminan pasti bahwa nantinya kaum profesional seperti dokter bertindak etis dalam menjalankan profesi. Namun minimal edukasi etika profesi menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan terkait dengan kepentingan orang banyak, syukur-syukur kesadaran ini menjadi pijakan bagi mereka kelak dalam menentukan keputusan dan mengabdikan pekerjaannya bagi kepentingan publik. Dan kesadaran ini sudah harus ditumbuhkan dalam proses belajar sedini mungkin.

Dengan kata lain, sejak awal cakrawala peserta didik tentang masalah-masalah mendasar yang terkait dengan profesinya dan keputusan-keputusan serta sikap-sikap apa yang harus mereka perlihatkan berhadapan dengan masalah itu sudah dibuka. Inilah yang penting. Komitmen kita dan pengakuan kita terhadap siapa manusia dan bagaimana manusia harus bertindak dalam pekerjaannya khususnya berhubungan dengan manusia akan menentukan orientasi ini.